

MONITORING DAN EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019

- Jumlah RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019 : 55 RUU

Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019

REKAPITULASI PELAKSANAAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2019						
PRIORITAS	RINCIAN RUU	RUU Prioritas	REALISASI			
			DAFTAR KUMULATIF TERBUKA			
			DOB	RATIFIKASI	APBN	PERPPU
Tahun 2019 55 RUU	- 35 RUU Usulan DPR, 16 RUU Usulan Pemerintah, 4 RUU Usulan DPD	4 RUU (DPR 3 + 1 Pem)		5		
JUMLAH		4 RUU (DPR 3 + Pem 1)	-	5		

DAFTAR JUDUL RUU YANG TELAH DITETAPKAN

NO.	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR	UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2.	RUU tentang Kebidanan	DPR	UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
3.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
4.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU pada rapat paripurna DPR tanggal 16 Juli 2019

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2019**

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
1	RUU tentang Pertanahan	DPR			Pembahasan Tk I		Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi II
2	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR			Pembahasan Tk I		Rapat Konsultasi Rapat Bamus tgl. 18 Januari MP III 2016-2017 dibahas oleh Komisi III
3	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR			Pembahasan Tk I		Komisi IV DPR RI Rapat dengan Tim Kerja Pemerintah Pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RAPAT TERTUTUP) (Tgl 25 Juni 2019)
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR			Pembahasan Tk I		
5	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR					Disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR			Pembahasan Tk I		

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR			Pembahasan Tk I		
8	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR			Pembahasan Tk I		
9	RUU tentang Pertembakauan	DPR			Pembahasan Tk I		RDPU terkait mendapatkan Masukan atau Tanggapan atas RUU tentang Pertembakauan Tgl 20 Maret 2019
10	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR			Pembahasan Tk I		
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR					Disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
12	RUU tentang Kebidanan	DPR					Disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR			Pembahasan Tk I		
14	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR			Pembahasan Tk I		Komisi IV DPR RI Rapat Panitia Kerja RUU dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
							terkait Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (26 Juni 2019)
15	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD			Pembahasan Tk I		
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR			Pembahasan Tk I		
17	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR			Pembahasan Tk I		
18	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR			Pembahasan Tk I		
19	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
20	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
21	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR			Pembahasan Tk I		RDP Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Pekerja Sosial dengan Panja Pemerintah membahas DIM RUU (Tgl 20 Juni 2019)
22	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR			Pembahasan Tk I Pembahasan DIM		RUU tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Agama RUU

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
					di Pemerintah		tentang Pendidikan Pesantren dan RUU tentang Pendidikan Madrasah Diniyah memiliki kedekatan substansi pengaturan dengan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan, sehingga diusulkan untuk menjadi satu RUU dengan judul "RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan".
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Proses Harmonisasi				
24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	Proses Harmonisasi				
25	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR	Proses Harmonisasi				
26	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR	Penyusunan				
27	RUU tentang Penyadapan	DPR	Penyusunan				Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang RUU tentang Penyadapan Agenda Paparan Tim Ahli (Tgl 17 Juni 2019)
28	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta	DPR	Penyusunan				

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
	Pemanfaatan Obat Asli Indonesia						
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	Penyusunan				
30	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	Penyusunan				
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR	Penyusunan				
32	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR	Penyusunan				Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana Agenda Paparan Tim Ahli (Tgl 17 Juni 2019)
33	RUU tentang Permusikan	DPR	Penyusunan				
34	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	Penyusunan				Rapat Dengar Pendapat Rapat dengan kepala BSSN terkait penyusunan RUU Keamanan dan ketahanan siber Tgl 28 Maret 2019
35	RUU tentang Perubahan	DPR	Penyusunan				

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
	Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan						
36	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD			Pembahasan Tk I		Rapat Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI dg Pemerintah tgl 28 Januari 2019
37	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD			Pembahasan Tk I		
38	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD			Pembahasan Tk I		Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan RDPU dengan Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan acara mendapatkan masukan / tanggapan atas RUU tentang Daerah Kepulauan. Tanggal 13 Feb 2019
39	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Penyusunan				
40	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
41	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
42	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	PEMERINTAH			I	Pembahasan Tk II	Disetujui menjadi UU pada rapat

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
	18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						paripurna DPR tanggal 16 Juli 2019
43	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
44	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
45	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
47	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH			Pembahasan Tingkat I		
48	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
49	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH		Menunggu Surat			

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PROSES				KETERANGAN
			INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
				Presiden (Surpres)			
50	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
51	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
52	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
53	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
55	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			

**PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019
USULAN PEMERINTAH**

SUDAH DISETUJUI MENJADI UU		
1.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH
PEMBAHASAN TINGKAT I		
2.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
3.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH
5.	RUU tentang Bea Meterai	PEMERINTAH
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan	PEMERINTAH
8.	RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	PEMERINTAH
PENYAMPAIAN KEPADA PRESIDEN PERMOHONAN SURPRES		
9.	RUU tentang Narkotika dan Psicotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH
10.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH
11.	RUU tentang Landas Kontinen (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia)	PEMERINTAH
12.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH
13.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH

14.	RUU tentang Wabah (dalam longlist: RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	PEMERINTAH
15.	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi)	PEMERINTAH
PENYUSUNAN INTERNAL PEMERINTAH		
16.	RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)	PEMERINTAH